

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



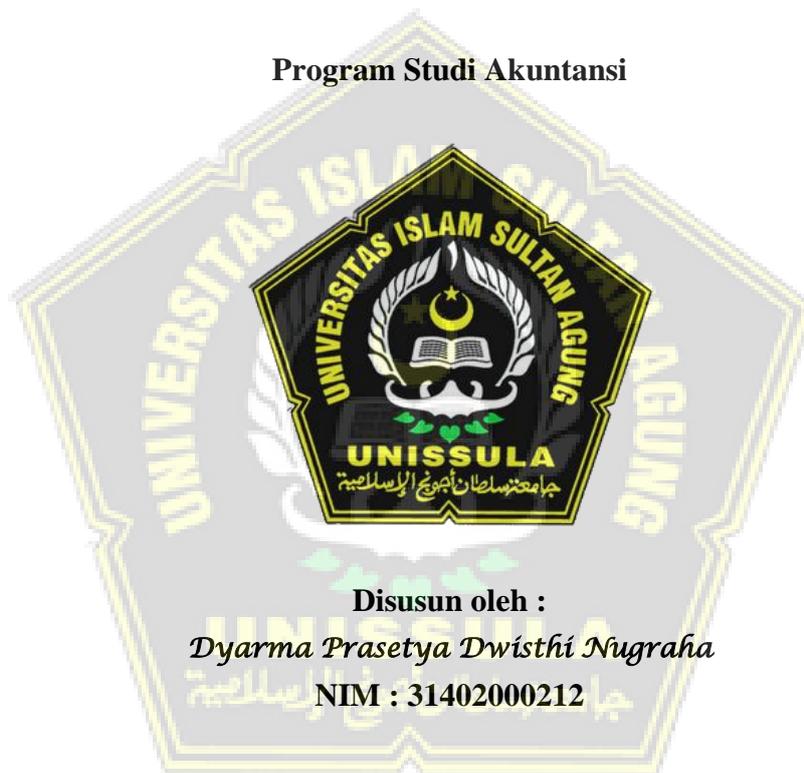
Disusun oleh :
Dyarma Prasetya Dwisthi Nugraha
NIM : 31402000212

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

Dyarma Prasetya Dwisthi Nugraha

NIM : 31402000212

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun oleh :

Dyarma Prasetya Dwisthi Nugraha

NIM : 31402000212

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan

Sidang Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

جامعته سلطان أبو نوح الإسلامية

Semarang, 07 Agustus 2022

Dosen Pembimbing



Drs. Osmad Muthaher, M.Si

NIK. 210403050

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun oleh :

Dyarma Prasetya Dwisthi Nugraha

NIM : 31402000212

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 22 Agustus 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing


Drs. Osmad Muthaher, M.Si

NIK. 210403050

Penguji

Digitally signed by
Lisa Kartikasari
Date: 2022.08.25
10:50:23 +0700'


Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211402010


Hendri Setyawan, S.E., M.PA

NIK. 211406019

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tanggal 22 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Dra. Hj. Winarsih, M.Si

NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyarma Prasetya Dwisthi Nugraha

NIM : 31402000212

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **(PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH)** merupakan hasil tulisan saya sendiri dan adalah benar keasliannya bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut daftar pustaka. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut baik disengaja atau tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari Universitas Sultan Agung Semarang.

Semarang, 07 Agustus 2022



Dyarma Prasetya Dwisthi Nugraha
NIM : 31402000212

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYARMA PRASETYA DWISTHI NUGRAHA

NIM : 31402000212

Program Studi : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 September 2022

Yang menyatakan,



(Dyarma Prasetya Dwisthi Nugraha)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian ini yaitu kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan purposive sampling dihasilkan 105 sampel yang memenuhi syarat pengujian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 21. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci : PKB, BBNKB, Retribusi Daerah, PAD

INTISARI

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kajian teori yang mendalam dan krisis, terdapat 3 hipotesis sebagai berikut : 1) PKB berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, 2) BBNKB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, 3) Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BAPENDA dan DJPK, dalam rentan waktu laporan realisasi anggaran tahun 2019 - 2021. Metode dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Menggunakan 35 data yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS 21 dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa PKB dan BBNKB berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Retribusi Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH”**. Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana I Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima dukungan, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, dalam kesempatan ini penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Olivia Fachrunnisa, S.E., M. Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universtas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. Winarsih, S.E., M.Si., Akt., CA, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universtas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Devi Permatasari S.E., M.Si., Akt., CA., selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan demi kelancaran proses perkuliahan,

4. Drs. Osmad Muthaher, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan waktu sehingga laporan ini dapat terselesaikan,
5. Bapak dan ibu dosen beserta staf karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Seluruh pegawai BAPENDA yang, mengarahkan, dan membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini,
7. Kedua orangtua dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan,
8. Rekan – rekan mahasiswa S1 Akuntansi Seroja Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi teman seperjuangan, khususnya angkatan 2020.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan dan akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Skripsi bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dan memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Semarang, 07 Agustus 2022



Dyarma Prasetya Dwisthi Nugraha

NIM : 31402000212

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1. Dasar Teori.....	12
2.1.1. <i>Stewardship Theory</i>	12

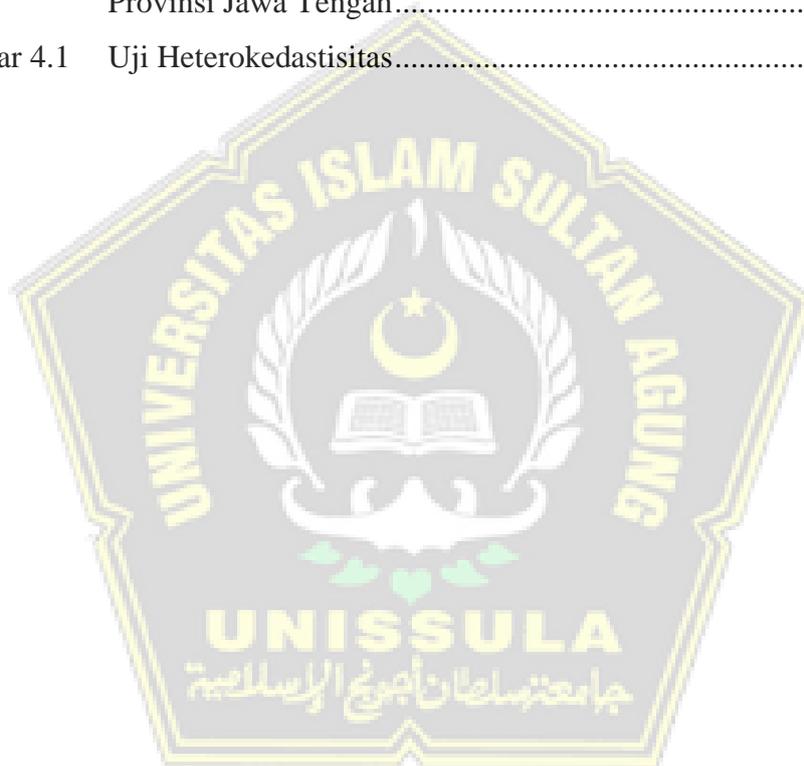
2.1.2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
2.1.3.	Pajak.....	14
2.1.4.	Pajak Daerah	15
2.1.5.	Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.1.6.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	18
2.1.8.	Retribusi Daerah.....	20
2.1.8.1	Retribusi Jasa Umum	20
2.1.8.2	Retribusi Jasa Usaha	21
2.1.8.3	Retribusi Perizinan Tertentu	22
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	23
2.3.	Pengembangan Hipotesis.....	32
2.3.1.	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah	32
2.3.2.	Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah	33
2.3.3.	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	34
2.4.	Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1.	Jenis Penelitian	38
3.2.	Populasi dan Sampel.....	38

3.2.1.	Populasi.....	38
3.2.2.	Sampel.....	39
3.2.3.	Teknik Sampling.....	39
3.3.	Sumber dan Jenis Data.....	40
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.5.	Variabel dan Indikator.....	41
3.5.1.	Variabel Independen.....	42
3.5.2.	Variabel Dependen.....	43
3.5.3.	Definisi Operasional Variabel.....	44
3.6.	Teknik Analisis.....	45
3.6.1.	Uji Statistik Deskriptif.....	46
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.6.2.1	Uji Normalitas.....	47
3.6.2.2	Uji Multikolinieritas.....	47
3.6.2.3	Uji Heterokedastisitas.....	48
3.6.2.4	Uji Autokolerasi.....	49
3.6.3.	Uji Hipotesis.....	50
3.6.3.1	Uji Simultan (Uji F).....	50
3.6.3.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
3.6.3.3	Uji Parsial (Uji t).....	50

BAB IV PEMBAHASAN.....	52
4.1. Deskripsi Penelitian.....	52
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif	53
4.1.3. Uji Asumsi Klasik.....	56
4.1.4. Uji Hipotesis.....	62
4.2. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Implikasi.....	70
5.3. Keterbatasan Penelitian	71
5.4. Agenda Penelitian Mendatang.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.....	37
Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas.....	59



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	4
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	45
Tabel 4.1 Distribusi Sampel Penelitian.....	52
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif	53
Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Tranformasi LN	56
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	57
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas.....	58
Tabel 4.6 Uji Autokolerasi.....	60
Tabel 4.7 Uji Regresi Linier Berganda	61
Tabel 4.8 Uji Simultan F.....	63
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi	63
Tabel 4.10 Uji Parsial (Uji t).....	64

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Tabulasi Data	78
LAMPIRAN 2 Analisis Statistik Deskriptif.....	85
LAMPIRAN 3 Uji Normalitas.....	86
LAMPIRAN 4 Uji Multikolinieritas dan Uji Parsila (Uji t).....	86
LAMPIRAN 5 Uji Heterokedastisitas	87
LAMPIRAN 6 Uji Autokorelasi dan Uji Koefisien Regresi (R^2)	87
LAMPIRAN 7 Uji Parsial (Uji F)	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan berjalannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Pasal 1 ayat (2), (6), dan (7) yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dimana pemerintah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengurus dan mengatur daerah otonom serta urusan daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat dalam daerah otonom tersebut.

Dengan penjelasan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewajiban serta hak dalam menjalankan urusan dalam daerahnya. Salah satu kelebihan yang terdapat dalam pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mendapatkan keluasaan dalam mengatur sendiri daerahnya masing-masing, yaitu pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri pula. Dengan dapat mengelola keuangannya sendiri pemerintah daerah diharapkan dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas dari pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Terdapat banyak pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya

pada Pasal 285 menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas 3 sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengelolaan pendapatan apabila dikelola dengan baik maka akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan sebuah daerah menjadi lebih maju, karena jika pengelolaan pendapatan diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah, maka akan memudahkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta dapat meringankan beban pemerintah daerah untuk mengikuti cepatnya perkembangan zaman.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dari pendapatan di pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat (18) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan atau pemasukan pada pemerintahan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (2021) menyatakan, “Bahkan jumlah PAD-nya ada yang melebihi dari transfer pusat”. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu terdapat beberapa daerah yang hasil PAD mereka, lebih dari dana yang di transfer oleh pusat, hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah dapat mengurus rumah tangganya secara mandiri dengan baik tanpa harus bergantung lebih kepada pemerintah pusat, serta didukung dengan pengelolaan pendapatan yang dikerjakan dengan baik.

Akan tetapi sejak pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, perekonomian di Indonesia menjadi menurun, dan hal tersebut juga akan berdampak langsung dengan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber pemasukan pemerintah daerah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (2020), “Pemerintahan daerah akan menghadapi tekanan, pendapatan asli daerah mereka mungkin akan turun. Untuk Pulau Jawa mungkin akan turun lebih tajam, yakni sekitar 40%”. Dengan pernyataan tersebut maka pemerintah daerah terutama daerah Jawa diharapkan untuk dapat mempersiapkan serta memperhatikan pendapatan dan pemasukan dalam pengelolaannya dan dapat memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan desentralisasi.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang harus waspada terhadap penurunan pendapatan asli daerahnya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (2020) menerangkan bahwa “PAD Jawa Tengah turun 1,9 Triliun, kira-kira 12,5%. Pajak kendaraan motor yang terbesar dalam penurunannya, terutama bea balik nama kendaraan bermotor”. Dari pernyataan tersebut pajak daerah yang memiliki kontribusi besar dalam pemasukan di pemerintahan daerah adalah pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat diperkuat dengan keadaan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dimana lalu lintas terlihat padat serta banyaknya pemilik dan pengguna kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 1.1 berikut akan menyajikan jumlah kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2020

Wilayah	Sepeda Motor	Mobil	Truk	Bus
Kabupaten Cilacap	752.008	44.767	20.762	793
Kabupaten Banyumas	693.638	60.915	25.160	1.721
Kabupaten Purbalingga	361.588	23.347	12.106	397
Kabupaten Banjarnegara	320.372	20.088	13.587	648
Kabupaten Kebumen	494.111	25.038	14.191	1.224
Kabupaten Purworejo	297.285	21.659	8.573	776
Kabupaten Wonosobo	265.486	20.135	14.224	983
Kabupaten Magelang	454.980	43.327	17.643	1.010
Kabupaten Boyolali	469.412	38.230	17.217	1.719
Kabupaten Klaten	710.411	55.235	22.415	1.278
Kabupaten Sukoharjo	526.087	52.543	12.856	683
Kabupaten Wonogiri	377.099	36.156	14.780	1.982
Kabupaten Karanganyar	466.935	51.584	16.947	1.567
Kabupaten Sragen	524.354	39.874	19.039	1.055
Kabupaten Grobogan	570.575	25.710	14.814	1.363
Kabupaten Blora	369.753	19.151	10.307	676
Kabupaten Rembang	257.103	13.301	8.997	1.086
Kabupaten Pati	614.722	45.035	25.568	1.322
Kabupaten Kudus	480.262	35.942	18.731	1.225

Wilayah	Sepeda Motor	Mobil	Truk	Bus
Kabupaten Jepara	597.237	34.586	23.700	1.263
Kabupaten Demak	522.943	25.018	15.857	1.045
Kabupaten Semarang	474.110	43.204	19.531	1.872
Kabupaten Temanggung	255.366	27.065	15.839	906
Kabupaten Kendal	480.569	26.207	13.141	888
Kabupaten Batang	319.972	18.082	11.257	521
Kabupaten Pekalongan	386.291	21.303	7.724	416
Kabupaten Pemalang	521.992	25.436	12.058	782
Kabupaten Tegal	589.296	28.295	14.812	451
Kabupaten Brebes	383.749	18.706	9.989	665
Kota Magelang	369.753	19.151	10.307	676
Kota Surakarta	465.626	71.120	23.457	1.802
Kota Salatiga	120.507	19.701	5.733	471
Kota Semarang	1.382.434	231.164	76.570	3.059
Kota Pekalongan	175.182	15.436	6.534	614
Kota Tegal	162.965	12.832	5.985	846

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat (12) dan pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sedangkan subjek pajaknya adalah orang atau badan yang memiliki sebuah kendaraan.

Faktor kedua yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha dan untuk subjek pajak dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu orang atau badan yang telah menerima sebuah kendaraan dari hasil pertukaran atas kesepakatan dua pihak atau lebih yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat (14) dan pasal 10 ayat (1).

Adapun faktor yang ketiga yaitu Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat (64), Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Terdapat tiga jenis objek pajak dalam retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dari kegiatan-kegiatan yang dapat dipungut retribusinya dari objek-objek retribusi tersebut, realisasi yang terjadi pada pemasukan retribusi pada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah masih mengalami naik turun. Hal tersebut diperjelas pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp 92.911.445.000	Rp 95.871.359.549
2016	Rp 94.332.477.000	Rp 106.225.058.566
2017	Rp 101.608.925.000	Rp 107.372.397.279
2018	Rp 108.979.571.000	Rp 104.870.144.923
2019	Rp 121.453.464.000	Rp 114.861.058.851

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan, terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Pada hasil penelitian milik Bernadin (2017) dan penelitian dari Hahumury (2018) memiliki hasil bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan hasil dari penelitian dari Nugrahwati et al (2019) berbeda dengan penelitian Bernadin (2017) dimana penelitian Nugrahwati et al (2019) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada penelitian Wahfar et al (2014) menunjukkan hasil bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif serta signifikan terhadap pendapatan asli daerah, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Ningsih dan Rahmayati (2018) dan penelitian dari Subagyo et al., (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor tidak mempunyai pengaruh terhadap

pendapatan asli daerah. Selanjutnya pada penelitian Ramadhan (2019) dijelaskan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan Saputri (2019) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Ramadhan (2019), dimana hasil penelitian Saputri (2019) menyebutkan bahwa retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap pajak pendapatan asli daerah. Begitu pula dengan penelitian dari Pramatha dan Aswitari (2018) dimana hasilnya menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah.

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat *research gap* yang memiliki makna belum mencapai kata konsisten antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, hal ini dikarenakan perbedaan akan wilayah serta waktu penelitian. Dari hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pajak daerah sebagai variabel independen dan berharap agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkombinasikan penelitian dari Nadya et al (2017) dan penelitian dari Tresnawati dan Putri (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, dimana objek penelitian yang peneliti gunakan adalah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan objek penelitian Nadya et al (2017) dilakukan di Provinsi Bali dan objek penelitian Tresnawati dan Putri (2017) dilakukan di Kota Bandung.

Peneliti mengambil Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian karena Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak

yaitu sekitar 36.516.035 jiwa yang telah terdata dalam BPS Jawa Tengah (2021) . Dengan penduduk sebanyak itu maka pengguna kendaraan bermotor serta pengajuan perizinan untuk mengadakan kegiatan pada Provinsi Jawa Tengah pun akan banyak. Seiring dengan itu maka pajak daerah yang berhubungan dengan kendaraan bermotor dan perizinan penggunaan wilayah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ruang lingkup masalah yang diangkat dalam Penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh dari bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian bertujuan untuk menguji, memperoleh bukti empiris, dan menganalisa mengenai :

1. Pengaruh dari pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengaruh dari bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengaruh dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Peneliti
Sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi daerah.
2. Pemerintah
Sebagai sumbangan untuk pemerintahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam pendapatan pajak daerah yang bertujuan untuk membangun serta memajukan Provinsi Jawa Tengah.
3. Peneliti Lain
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan untuk belajar serta dapat dijadikan untuk bahan dalam penelitian selanjutnya supaya dapat

mengembangkan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan yang sama

4. Pembaca

Sebagai informasi dan bahan referensi untuk mendalami hal yang terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak daerah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori

2.1.1. *Stewardship Theory*

Berdasarkan penjelasan dari Donaldson & Davis (1991) dalam (Anasta & Nengsih, 2019), mendeskripsikan bahwa tidak terdapat suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi buat tujuan-tujuan individu melainkan lebih focus untuk tujuan target utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi tentang teori stewardship dibangun sesuai sifat manusia yaitu bisa dipercaya, bisa bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan dapat berlaku amanah untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa manajemen bisa berperilaku baik buat kepentingan public dan umumnya maupun shareholders.

Teori ini mendeskripsikan hubungan yg kuat antara kepuasan serta kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan pada sebuah organisasi bisa dicapai menggunakan cara maksimalisasi utilitas principals serta manajemen. Teori stewardship bisa diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan serta non-profit lainnya.

Penerapan *stewardship theory* pada penelitian ini ialah bahwa pemda bertindak menjadi *steward*, dimana pemda memiliki wewenang untuk

merencanakan, mengendalikan, serta mengelola pendapatan keuangan daerah. Disini *steward* (pemda) dianggap sebagai pelaku utama dalam melaksanakan manajemen pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang khususnya bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi daerah yang berlaku secara rasional dan tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah yang mempunyai motif yang sejalan dengan tujuan principal.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap pemasukan di pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim (2007, hal 96) “Pendapatan Asli Daerah segala pemasukan atau pendapatan yang masuk ke pemerintah daerah dari sumber ekonomi yang dikelola oleh daerah”. Sedangkan dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 1 ayat (18) dijelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang masuk ke daerah melalui sumber ekonomi yang ada di daerah tetapi didasari dengan Peraturan Daerah yang berlaku di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

tepatnya pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber yaitu :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.1.3. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pengertian lain dari pajak menurut N. Rompis (Atteng et al., 2019) yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk pengeluaran umum. Menurut Siti Resmi (2017, hal 3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair* memiliki arti pajak sebagai sumber pemasukan dalam pemerintah dalam pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi *regularend*

mempunyai arti pajak menjadi sebagai pengatur pemerintah dalam memutuskan kebijakan dalam bidang diluar keuangan.

2.1.4. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011, hal 12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat

Menurut apa yang tertera di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal (1) dan (2), terdapat 2 jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten yang kemudian dijabarkan menjadi :

1. Jenis Pajak Provinsi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemungutan pajak daerah, dilakukan untuk dapat memenuhi kas daerah serta untuk membangun daerah menjadi lebih maju. Hasil pemungutan pajak daerah bersumber dari para Wajib Pajak yang membayarkan sebagian kekayaan mereka untuk membantu pemerintah daerah serta untuk memenuhi kebutuhan hidup para Wajib Pajak.

2.1.5. Pajak Kendaraan Bermotor

Didalam sebuah pemerintahan daerah pasti terdapat penduduk yang menjalankan sistem pemerintahan tersebut. Dan dalam penduduk tersebut, setidaknya 1 keluarga, memiliki kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan

Tahun 2020 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2020 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

- a. NJKB; dan
- b. Bobot yang mencerminkan relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa objek pajak dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.. Dan kendaraan bermotor yang dikecualikan dari PKB adalah :

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
- c. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sedangkan subjek pajak dari PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dan yang menjadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan tersebut.

2.1.6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2020 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2020 menerangkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa objek pajak dari BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, dan ada beberapa objek pajak yang dikecualikan yaitu :

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan konsulat perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan /atau dikuasai Pabrikan atau import yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita; dan
- f. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Untuk subjek pajak pada BBNKB merupakan orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Kemudian untuk Wajib pajaknya merupakan orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Sama seperti PKB dasar pengenaan pajak BBNKB yaitu dari NJKB, dan ditinjau Kembali setiap tahun. Untuk tarif dari BBNKB dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen),

Khusus untuuntuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajhak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

2.1.7. Retribusi Daerah

Deskripsi dari retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Terdapat 3 jenis retribusi daerah menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

2.1.8.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan salah satu jenis retribusi daerah, dan objek retribusi jasa umum itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Sedangkan subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Kemudian dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa retribusi jasa umum meliputi :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
- c. Retribusi pelayanan pendidikan.

2.1.8.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha memiliki objek pajak berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi (Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Dan untuk subjek pajaknya yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Retribusi Jasa Usaha menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi tempat pelelangan;
- c. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- e. Retribusi terminal; dan
- f. Retribusi pelayanan kepelabuhan.

2.1.8.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu yang tertera dalam Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dan untuk subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Untuk jenis retribusi perizinan tertentu dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Retribusi izin trayek; dan
- b. Retribusi izin usaha perikanan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan dasar pembuatan penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Nadya et al., (2017)	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Pajak Kendaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang

		<p>Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Bermotor (X1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<p>positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 4 tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2016.
2	Tresnawati dan Putri (2017)	<p>Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Retribusi Daerah (X) • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah berpengaruh fluktuatif terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana tahun 2011-2014 berpengaruh positif dan tahun

		Kota Bandung		2015 berpengaruh negatif.
3	Bernadin (2017)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Kendaran Bermotor (X) • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4	Nugrahwati et al., (2019)	Analiis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Kendaran Bermotor (X1) • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) • Pajak Bahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap

		Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bakar Kendaraan Bermotor (X3) • Pendapatan Asli Daerah (Y)	pendapatan asli daerah.
5	Wahfar et al. (2014)	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan	• Pajak Kendaraan Bermotor (X1) • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) • Pendapatan Asli Daerah (Y)	• Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan beba balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pidie		pendapatan asli daerah.
6	Ningsih dan Rahmayati (2018)	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Kendaraan Bermotor (X1) • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (X3) • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor meliki hasil tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

7	Ramadhan (2019)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah (X1) • Retribusi Daerah (X2) • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai hasil sama-sama positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
8	Saputri (2019)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah (X1) • Retribusi Daerah (X2) • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah memiliki hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah memiliki hasil berbeda yaitu tidak

				berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
9	Periansya et al., (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Kendaraan Bermotor (X1) • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, tetapi untuk bea balik nama kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
10	Aliah et al., (2019)	Pengaruh Pajak Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

		Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh	Bermotor (X1) • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) • Pendapatan Asli Daerah (Y)	kendaraan bermotor memiliki pengaruh sama, yaitu berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
11	Saputra dan Putri (2020)	Pengaruh PKB, BBNKB, Dan PBBKB Terhadap PAD (Studi pada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 – 2019)	• Pajak Kendaraan Bermotor (X1) • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) • Pajak Bahan Bakar Kendaraan	• Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan memiliki pengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah. Ketiga variabel juga

			<p>Bermotor (X3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<p>secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah</p>
12	<p>Putri dan Rahayu (2015)</p>	<p>Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah (X1) • Retribusi Daerah (X2) • Pendapatan Asli Daerah (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi secara positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan penelitian dari (Nadya et al., 2017) dan penelitian dari (Tresnawati & Putri, 2017). Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi daerah serta menggunakan 1 variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi besar terhadap pemasukan dalam pemerintahan daerah. Dapat dilihat dari kondisi di pemerintahan daerah saat ini dimana mayoritas penduduk di dalam daerah setidaknya 1 keluarga memiliki 1 kendaraan bermotor. Dalam kepemilikan kendaraan kendaraan tersebut pemerintah daerah memungut pajak yang bertujuan agar pemerintah menerima pemasukan yang nantinya dana pemasukan tersebut digunakan untuk mengembangkan dan memajukan daerah tersebut.

Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dimana jika pemasukan pajak semakin tinggi maka akan berefek semakin baik dengan pendapatan asli daerah. Dan dikarenakan hal tersebut sebagai soerang wajib pajak diharapkan mempunyai tanggung jawab dalam pembayaran pajak dikarenakan memiliki kendaraan bermotor sesuai dengan penjelasan dari

Nadya et al., (2017). Pada *stewardship theory* pemasukan PKB yang tinggi menunjukkan perencanaan manajemen yang baik oleh *steward* sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Periansya et al., (2017), dimana penelitian tersebut menyebutkan bahwa pajak kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian dari Aliah et al., (2019) yang menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis :

H1 : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Bea balik nama kendaraan bermotor juga merupakan salah satu kontributor pemasukan pemerintah daerah dalam membangun serta memajukan suatu daerah. Bea balik nama kendaraan bermotor sendiri tidak bisa lepas dari pajak kendaraan bermotor, karena dalam proses jual beli kendaraan bermotor, pemungutan pajak bea balik nama dilakukan saat subyek pajak akan setelah membalik nama kepemilikan kendaraan bermotor.

Maka dari itu, muncul dugaan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Pada

stewardship theory pemasukan BBNKB yang tinggi menunjukkan pengelolaan manajemen yang baik oleh *steward* sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Karena itu dibutuhkan peran dari pemerintah daerah untuk dapat menciptakan dimana kondisi perekonomian daerah stabil, dengan begitu perekonomian warga dapat berkembang dan berpengaruh pada daya beli masyarakat, dikutip Syaiful, (2013) dalam Nadya et al., (2017). Dan dengan meningkatnya daya beli tersebut masyarakat akan terdorong untuk membeli kendaraan baru atau pun membalik nama kendaraannya ke keluarga lain, dikutip Nadya et al., (2017). Hasil penelitian dari Saputra & Putri (2020) menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan hasil penelitian dari Nadya et al., (2017) juga menunjukkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat mengambil hipotesis sebagai berikut :

H2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pemasukan di pemerintah daerah. Retribusi daerah sendiri dipungut oleh pemerintah daerah dari berbagai kegiatan retribusi yaitu pemberian pelayanan dan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peran dari masyarakat untuk membayar retribusi sangat diperlukan untuk menumbuhkan retribusi daerah, dan jika semakin besar retribusi daerah, maka akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerahnya, dikutip Yusuf (2020). Berkaitan dengan *stewardship theory* pemasukan retribusi daerah yang tinggi menunjukkan pengelolaan manajemen yang baik oleh *steward* sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa retribusi daerah juga berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

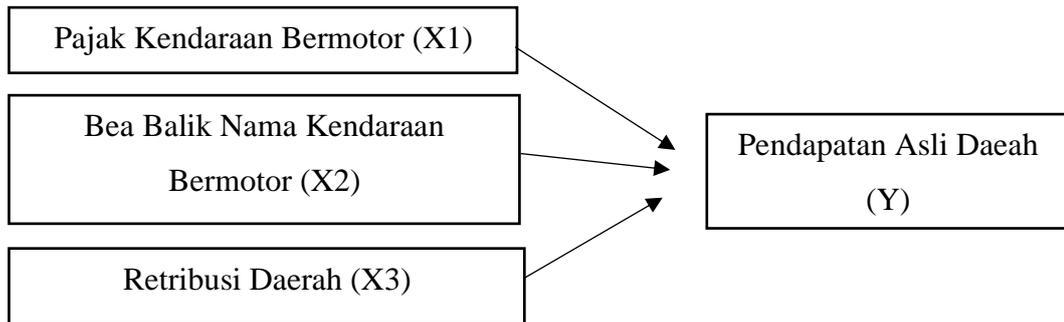
Dengan dugaan tersebut dan dari hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian milik Ramadhan (2019) ditemukan hasil bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, begitu juga dengan penelitian dari Putri & Rahayu (2015) memiliki hasil yang sejalan yaitu retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan begitu, dari uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H3 : Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah.

2.4. Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pemasukan dalam pemerintahan daerah. Tinggi dan rendahnya pendapatan asli daerah tergantung dari bagaimana pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pertumbuhan ekonomi dalam pemerintahan daerah.. Padatnya penduduk dalam sebuah daerah juga dapat mempengaruhi pemasukan pajak dan retribusi daerah serta kemampuan masyarakat dalam menciptakan output pada daerah tersebut..

Kebutuhan akan kendaraan bermotor pastilah penting dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan padatnya penduduk dalam suatu daerah, jika dimisalkan dalam 1 keluarga, pastilah setidaknya memiliki 1 buah kendaraan bermotor, dengan memiliki kendaraan bermotor tersebut maka, maka pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor per tahun untuk kepemilikan motor tersebut yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian untuk bea balik nama kendaraan bermotor juga tidak lepas dari pajak kendaraan bermotor, karena dalam proses jual beli kendaraan bermotor, maka akan dipungut pajak juga berdasarkan dari nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Untuk retribusi daerah hubungannya yaitu dikarenakan padatnya penduduk, maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga banyak. Retribusi dipungut dari masyarakat melalui pelayanan dan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1:

Kerangka Penelitian

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif kausal dan dengan menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Penelitian asosiatif kasual sendiri menurut Sugiyono (2013, hal 36-37), merupakan penelitian yang dilakukan dan memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan ataupun hubungan antara variable independent dengan variable dependen. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian tersebut dikarenakan penelitian ini akan menguji pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang dijadikan atau ditetapkan sebagai wilayah yang akan dipelajari dan diteliti oleh peneliti dikarenakan wilayah tersebut memiliki objek/subjek yang berkualitas dan mempunyai sebuah karakteristik, dikutip Sugiyono, 2013, hal 80).

Dari pengertian tersebut, dapat ditunjukkan bahwa populasi bukanlah hanya seorang manusia, tetapi objek dan benda-benda alam yang memiliki karakteristik ataupun sifat, dan populasi juga bukan merupakan jumlah atau banyaknya suatu objek/subjek.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi JawaTengah berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013, hal 81), sampel merupakan bagian dari karakteristik beserta jumlah yang dimiliki oleh sebuah populasi. Sedangkan menurut Syahrudin dan Salim (2012, hal 113-114), sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik tersendiri untuk dapat diteliti. Terlalu besarnya populasi memungkinkan peneliti akan kesulitan dan penelitian akan menjadi terhambat, oleh karena itu dalam penelitian ini, dengan jumlah populasi yang terbatas, sampel yang digunakan yaitu berupa data realisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

3.2.3. Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:139), teknik sampling dideskripsikan sebagai teknik yang digunakan peneliti untuk menentukan atau pengambilan sebuah sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling *Nonprobability Sampling*, yang dimana teknik pengambilan sampling ini tidak memberi kesempatan/peluang yang sama kepada anggota ataupun

unsur dari populasi untuk dijadikan menjadi sebuah sampel (Sugiyono, 2017:142).

Salah satu teknik sampling dari *Nonprobability Sampling* yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013, hal 85) *purposive sampling* merupakan jenis sampel yang menggunakan pertimbangan dalam pemilihan sampelnya. Sampel dalam penelitian ini dapat terbentuk dengan melalui beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Kabupaten dan Kota yang termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021.
2. Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan data realisasi PKB, BBNKB, Retribusi Daerah dan PAD untuk periode 2019-2021.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, karena informasi diperoleh melalui media lain, seperti orang lain ataupun melalui dokumen, dikutip Sugiyono, (2017, hal 219).

Dalam melaksanakan penelitian ini, sumber data berupa informasi-informasi yang memuat tentang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang didapatkan

dari instansi dan web resmi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah dan DJPK.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015, hal 329), metode dokumen salah satu cara pengumpul data untuk memperoleh informasi dengan mengamati sebuah tulisan, angka, atau gambar yang dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mengamati dokumen-dokumen berupa laporan keuangan daerah dan laporan realisasi pendapatan yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah dan DJPK.

3.5. Variabel dan Indikator

Menurut Sugiyono (2017, hal 66), variabel merupakan sebuah objek maupun subjek yang ditetapkan oleh peneliti dan memiliki bentuk apa saja dan kemudian dipelajari untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut dan kemudian untuk diambil kesimpulannya atas informasi tersebut.

Jadi, variabel merupakan sebuah karakteristik dari sebuah individu ataupun organisasi yang kemudian dapat diukur maupun diobservasi untuk diteliti, supaya data yang diteliti dapat menghasilkan data yang memiliki sifat kategori (data nominal) atau memiliki sifat data kontinum (ordinal, interval dan rasio).

Berdasarkan dengan variabel yang memiliki sifat serta dengan variasi dan memiliki hubungan antar variabel, pada penelitian ini terdapat 2 (dua) macam variabel, yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

3.5.1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017, hal 68), variabel independent atau yang biasa disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi ataupun yang menyebabkan berubahnya atau timbulnya variabel dependen/variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independent yaitu :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (X1)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang di pungut terhadap kepemilikan sebuah kendaraan bermotor. Menurut Bernadin (2017) pengukuran pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan membandingkan total jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor yang ada pada suatu daerah.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan kepemilikah suatu kendaraan bermotor yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang dihasilkan dari proses jual beli atau sejenisnya. Bea balik nama kendaraan bermotor sendiri juga sama dengan pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak

provinsi, sehingga pengukuran juga dengan membandingkan total jumlah realisasi pajak tersebut.

c) Retribusi Daerah (X3)

Retribusi daerah merupakan pungutan wilayah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin eksklusif yang spesifik disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah buat kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Mauri et al (2017) indikator yang digunakan untuk mengukur retribusi daerah adalah total pendapatan retribusi yang terjadi pada suatu wilayah.

3.5.2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono, (2017, hal 68) variabel dependen atau dikenal dengan variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat atau variabel yang dipengaruhi karena efek adanya variabel bebas atau variabel independent.

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah sendiri menurut Abdul Halim (2007, hal 96), yaitu segala penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber daerah yang dipungut sesuai dasar dari peraturan daerah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah itu sendiri. Menurut Hermawan et al., (2016) pengukuran dari

variabel PAD menggunakan skala rasio. Dan pengukuran PAD bisa dilaksanakan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah}$$

3.5.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dibutuhkan supaya informasi terkait dengan variabel yang akan diteliti lebih jelas dan lebih rinci. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka terdapat 4 variabel penelitian, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (X1);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2);
3. Retribusi Daerah (X3);
4. Pendapatan Asli Daerah (Y).

Demi kepentingan dalam pengujian hipotesis, ke lima variabel diatas akan dijabarkan lebih lanjut melalui sebuah tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	Jumlah realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor.	Rasio
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)	Jumlah realisasi pendapatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.	Rasio
3	Retribusi Daerah (X3)	Jumlah realisasi pendapatan retribusi daerah.	Rasio
4	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rasio

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

3.6. Teknik Analisis

Model analisis informasi yang digunakan merupakan analisis linier berganda yang mempunyai tujuan guna mengenali besarnya pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Informasi diolah dengan dukungan aplikasi SPSS. Pengujian hipotesis akan dicoba dengan memakai model regresi variabel

independen terhadap variabel dependen. Model persamaannya ialah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda

X1 = Pajak Kendaraan Bermotor

X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X3 = Retribusi Daerah

e = error

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan supaya nilai tertinggi, terendah, serta nilai rata-rata, serta standar deviasi dari setiap variabel dapat terlihat dan dapat menjadi informasi tambahan.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Guna memperoleh ketepatan model yang hendak dianalisis akan dibutuhkan pengujian asumsi klasik, hal tersebut dikarenakan data yang akan dimasukkan dalam model regresi berganda harus memenuhi syarat dan

ketentuan yang ada di dalam regresi berganda. Uji asumsi klasik tersebut antara lain adalah:

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki fungsi guna menguji variabel, apakah dalam model regresi, variabel residual atau variabel pengganggu mempunyai distribusi wajar. Layaknya diketahui uji t serta F mengasumsikan kalau nilai residual mengikuti distribusi wajar. Jika asumsi ini dilanggar akan mengakibatkan uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang dipakai untuk menguji normalitas residual yaitu menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Sminov, dikutip Imam Ghozali (2011 hal 160). Dasar pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-Sminov adalah jika diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian dianggap berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian akan dianggap tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2. Uji Multikolinieritas

Menurut Bhuono Agung (2005, hal 58) uji multikolinieritas dibutuhkan guna mengetahui apakah terdapat sebuah variabel bebas yang serupa dengan variabel bebas lainnya didalam suatu model. Kesamaan antar variabel bebas dalam suatu model akan menimbulkan

korelasi yang amat kuat antara suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lainnya.

Pendeteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses menarik sebuah kesimpulan terkait tentang pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Salah satu cara untuk dapat mendeteksi gejala autokorelai dalam autokorelasi ialah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflating factor (VIF). Pengambilan keputusan dalam uji ini jika dilihat dari nilai tolerance diperoleh lebih dari 0,10 maka model regresi tidak memiliki gejala multikolinieritas, jika diperoleh kurang dari 0,10 maka disimpulkan terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi. Sedangkan jika dilihat dari nilai VIF, misal didapatkan hasil kurang dari 10 maka tidak ada gejala multikolinieritas, tetapi jika didapatkan lebih dari 10, maka dalam model regresi terdapat gejala multikolinieritas.

3.6.2.3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas yakni suatu kondisi dimana residual dari semua pengamatan dalam model regresi memiliki varians yang tidak sama. Situasi ini berarti bahwa varians dari setiap kesalahan adalah heterogen, yang melanggar asumsi klasik bahwa varians dari kesalahan harus homogen. Seperti halnya masalah multikolinearitas, model

regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Pengujian yang berkaitan dengan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain uji Glejser, uji Spearman, uji Park, dan mode tampilan grafik regresi. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Scatterplot. Menurut Imam Ghozali (2011) pengujian dilakukan dengan memprediksikan nilai variabel yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Data akan dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika pola yang terbentuk tidak jelas, dan titik-titik pada tabel tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

3.6.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dirancang untuk menguji ada tidaknya korelasi antara *confounding error* periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linier. Jika terdapat korelasi, maka disebut masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena pengamatan terus menerus berkorelasi satu sama lain dari waktu ke waktu. Pengujian yang digunakan untuk mencari masalah autokorelasi ini adalah uji Durbin-Watson (DW test). Uji DW digunakan untuk korelasi orde pertama, yang memerlukan konstanta dalam model regresi dan tidak ada lagi variabel antar variabel bebas. Pengujian ini membandingkan hasil statistik DW dengan tabel DW. Pengambilan keutusan terdiri dari 3

keputusan, yang pertama dimana jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka terdapat autokorelasi, kemudian jika $d_U < d < (4 - d_U)$, memiliki arti tidak ada autokorelasi, kemudian jika $d_L < d < d_U$, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti.

3.6.3. Uji Hipotesis

3.6.3.1. Uji Simultan (Uji F)

Uji simulta ini dilakukan untuk mengetahui apakah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi daerah, semuanya berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada tingkat kepercayaan atau tingkat uji hipotesis sebesar 5%.

3.6.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui lebih jelas seberapa besar hubungan antara beberapa variabel. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi yang dimiliki variabel lain. Cara menghitung koefisien determinasi adalah $R^2 \times 100\%$.

3.6.3.3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji secara parsial variabel dependen yaitu apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel independen yang terdiri dari pajak kendaraan

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi daerah. Untuk menguji hipotesis ini, uji t-statistik standar digunakan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi $< 0,05$ artinya hipotesis diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Nilai signifikansi $> 0,05$ maknanya hipotesis ditolak. Hal ini memberitahu bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten dan kota pada daerah Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan data yang sudah didapat, pada penelitian ini yaitu berupa data realisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah selama 3 periode, yaitu dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak tetapi dibatasi dengan kriteria yang ditentukan oleh penulis. Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Sampel Penelitian

Keterangan	Total
Pemerintahan Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan data realisasi PKB, BBNKB, Retribusi Daerah dan PAD untuk periode 2019-2021	35

Pemerintahan Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jawa Tengah yang tidak menerbitkan data realisasi PKB, BBNKB, Retribusi Daerah dan PAD untuk periode 2019-2021	0
Total Periode	3
Total sampel yang digunakan	105

Sumber : Data sekunde yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, disebutkan bahwa data yang dapat dipakai yaitu sebanyak 105 sampel dari total 3 periode.

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2011) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum, serta bertujuan supaya mempermudah untuk memahami variabel yang digunakan.

Tabel 4.2
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKB	105	55577560500	738099085150	131442868586	106850315924
BBNKB	105	14001718000	529566147025	80178699963.1	67521924142.8
Retribusi	105	45660000	5111300083	364411281.19	614157209.232
PAD	105	212780000000	2386940000000	430573333333	318776309218

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil analisis dari total sampel berjumlah 105 yang berupa data realisasi pajak kendaraan bermotor,

bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota sebanyak 35 selama 3 periode yaitu 2019-2021. Adapun penjelasan terhadap tiap variabel yang telah dianalisis dalam tabel 4.2 adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen

- a) Dilihat dari tabel 4.2, data analisis deskriptif pajak kendaraan bermotor memiliki nilai paling rendah yaitu 55.577.560.500, sedangkan untuk nilai paling tinggi berada di angka 738.099.085.150, dan untuk nilai rata-rata sebesar 131.442.868.586. Untuk nilai standard deviasinya berada di angka 106.850.315.924, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata variabel, yang mengartikan bahwa hasil dari penyebaran data berindikasi baik.
- b) Hasil dari analisis deskriptif bea balik nama kendaraan bermotor menunjukkan nilai paling rendah sebesar 14.001.718.000, sedangkan untuk nilai maksimum berada diangka 529.566.147.025, untuk nilai rata-rata berada diangka 80.178.699.963. Sedangkan nilai standar deviasinya menunjukkan nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata yaitu 67.521.924.142, yang dapat diartikan bahwa penyebaran data berindikasi baik.
- c) Data analisis dari variabel retribusi daerah, nilai terendahnya menunjukkan angka 45.660.000, kemudian

untuk nilai tertingginya berada di angka 5.111.300.083 dan nilai rata-ratanya berada di angka 364.411.281. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya menunjukkan angka 614.157.209, yang memiliki nilai lebih besar dari nilai meannya, dan dapat disimpulkan penyebaran datanya berindikasi kurang baik.

2. Variabel Dependen

Data analisis deskriptif dari variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan nilai minimum sebesar 212.780.000.000, dan untuk nilai maksimumnya sebesar 2.386.940.000.000, kemudian nilai meannya menunjuk angka sebesar 430.573.333.333. Sedangkan nilai deviasinya sebesar 318.776.309.218 yang mana lebih kecil dari nilai mean, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data berindikasi baik.

Dikarenakan nilai standard deviasi dari retribusi daerah lebih besar dari mean dan nominal data terlalu besar, maka peneliti akan mentransformasikan data menjadi $\log-n$, atau logaritma natural supaya hasil dari olah data menjadi lebih mudah untuk dipahami. Berikut adalah hasil dari transformasi data menjadi $\log-n$ dimana nilai standard deviasi setiap variabel sudah lebih kecil dari nilai meannya :

Tabel 4.3

Analisis Deskriptif Transformasi LN

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_X1	105	24.74	27.33	25.4553	.47123
Ln_X2	105	23.36	27.00	24.9140	.59287
Ln_X3	105	17.64	22.35	19.0533	1.05835
Ln_Y	105	25.45	28.50	26.6648	.41981

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan kecocokan model yang hendak dianalisis, hal tersebut dikarenakan data yang akan dimasukkan dalam model regresi berganda harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam regresi berganda. Uji asumsi klasik tersebut antara lain adalah:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menunjukkan apakah data telah berdistribusi normal atau tidak. Model distribusi data yang baik adalah model data yang berdistribusi secara normal, hal ini dikarenakan data yang berdistribusi normal akan memperendah kemungkinan dari terjadinya penyimpangan. Untuk menguji pendistribusian data, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Sminov dengan ketentuan jika hasil nilai $K-S > 0.05$ maka akan dianggap data berdistribusi normal.

Tabel 4.4

Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov	0,071

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Pada tabel 4.4 hasil dari analisis menunjukkan total data yang digunakan pada penelitian ini adalah 105 sampel, dan hasil dari distribusi data sampel tersebut berdistribusi normal. Hal tersebut ditandai dengan hasil dari nilai K-S lebih besar dari nilai signifikansi yaitu $0,071 > 0.05$, hal tersebut mengartikan bahwa data berdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dibutuhkan guna mengetahui apakah terdapat sebuah variabel bebas yang serupa dengan variabel bebas lainnya didalam suatu model. Model regresi yang bagus sebaiknya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah variabel bebas penelitian ini berkolerasi satu sama lain atau tidak adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *Tolerance* lebih tinggi dari 0,10 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) tidak lebih tinggi dari angka 10 maka tidak terjadi multikolinieritas pada tiap variabel bebas.

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Ln_X1 PKB	0,277	3,610
Ln_X2 BBNKB	0,225	4,449
Ln_X3 Retribusi	0,665	1,504

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

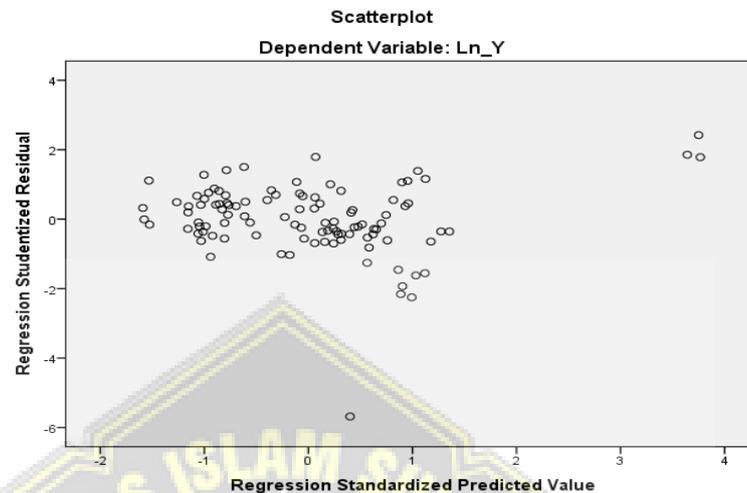
Pada tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwan nilai *Tolerance* pada setiap variabel lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dari tiap variabel bebas tidak ada yang melebihi angka 10. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap variabel bebas yang diteliti tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas ditujukan untuk menentukan apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian heterokedastisitas menggunakan uji scatterplot. Uji scatterplot dapat dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika dalam gambar scatterplot, pola yang terbentuk tidak jelas, dan titik-titik pada tabel tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji scatterplot dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 4.1

Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dapat dilihat dalam gambar tersebut, bahwa pola yang terbentuk tidak beraturan, dan juga titik – titik pada gambar tersebar pada sumbu 0 atau sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada data.

4) Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dirancang untuk menguji ada tidaknya korelasi antara *confounding error* periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Jika terdapat korelasi, maka disebut masalah autokorelasi. Autokorelasi akan terdeteksi karena pengamatan terus menerus berkorelasi satu sama lain dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan uji duwrbin-watson untuk mendeteksi apakah terjadi autokolerasi atau tidak dalam data. Hasil uji durbin Watson dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Uji Autokolerasi

Durbin-Watson (d)	dU	4-dU
2,032	1,7411	2,2589

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Hasil dari uji durbin-watson dapat dilihat pada tabel 4.6, dimana nilai $d = 2,032$. Pada durbin Watson data akan dianggap tidak terjadi gejala auto kolerasi bila hasil dari pengujian adalah $dU < d < (4-dU)$. Pada tabel Durbin Watson, dengan jumlah $k = 3$ (variabel bebas) dan $n = 105$ (total sampel yang digunakan), menunjukkan angka $dU = 1,7411$. Dengan hasil tersebut maka diperoleh perhitungan yaitu $1,7411 (dU) < 2,032 (d) < 2,2589 (4-dU)$, dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokolerasi dalam data.

5) Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh antara variabel independent yang dalam penelitian ini terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2), dan Retribusi Daerah (X3) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Hasil uji regresi linier berganda yang telah diolah menggunakan SPSS 21 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	8,272	6,473	0,000
Ln_X1 PKB	0,605	6,390	0,000
Ln_X2 BBNKB	0,154	2,053	0,049
Ln_X3 Retribusi	0,044	1,602	0,112

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari hasil data diatas untuk membuat model regresi linier berganda, yang digunakan dari tabel diatas adalah nilai yang terdapat pada kolom B (beta). Dari hasil olah data ditemukan bahwa nilai *Constant* sebesar 8,272, kemudian variabel PAD senilai 0,605, variabel BBNKB sebesar 0,154, dan variabel Retribusi sebesar 0,044. Dari besar nilai tersebut maka dapat diperoleh model sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 8,272 \alpha + 0,605 \text{ PKB} + 0,154 \text{ BBNKB} + 0,044 \text{ Retribusi} + e$$

Dari model tersebut maka dapat dijelaskan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai yang diperoleh dari konstanta yaitu 8,272 memiliki arti bahwa, misalkan nilai dari X1, X2, dan X3 yang pada kasus ini adalah PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah adalah nol, maka nilai PAD akan naik sebesar 8,272.
- 2) Nilai koefisien regresi PKB diketahui bernilai positif sebesar 0,605, hal ini dapat diartikan setiap kenaikan PKB

sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai PAD sebesar 0,605, jika diasumsikan variabel lain bersifat tetap.

3) Nilai koefisien regresi BBNKB diketahui bernilai positif sebesar 0,154, hal ini dapat diartikan setiap kenaikan BBNKB sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai PAD sebesar 0,154, jika diasumsikan variabel lain bersifat tetap.

4) Nilai koefisien regresi Retribusi Daerah diketahui bernilai positif sebesar 0,044, hal ini dapat diartikan setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai PAD sebesar 0,044 jika diasumsikan variabel lain bersifat tetap.

4.1.4. Uji Hipotesis

1) Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji kelayakan model ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan pada sebuah model regresi. Uji F dapat diketahui melalui variabel bebas dalam regresi berpengaruh secara bersamaan atau tidak terhadap variabel terikat, yang dalam hal ini variabel bebas terdiri dari PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah terhadap variabel terikat yaitu PAD dan diukur pada tingkat kepercayaan atau tingkat uji hipotesis sebesar 5%. Uji F pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8**Uji Simultan F**

F	Sig.
72,963	0,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari hasil olah data yang telah dilakukan, pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil dari uji F-hitung 72,963 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dikarenakan hasil nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PAD, oleh karena itu uji dari model regresi tersebut dianggap layak untuk dipakai dalam penelitian.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dipakai untuk mengetahui lebih jelas seberapa besar hubungan antara beberapa variabel. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi yang dimiliki variabel lain. Cara menghitung koefisien determinasi adalah $R^2 \times 100\%$. Uji koefisien regresi berganda akan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9**Uji Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square
0,827	0,684	0,675

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui nilai dari *Adjusted R square* sebesar 0,675 dan disimpulkan sebesar 67,5%. Makna dari hal tersebut yaitu variabel PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah, secara bersamaan mempengaruhi variabel terikat yaitu PAD sebesar 67,5%. Sedangkan untuk sisanya yaitu 32,5% dari total persen yaitu 100%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dipakai didalam penelitian.

3) Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t pada dasarnya untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai signifikansi dapat diketahui jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka akan dianggap signifikan, dan untuk arah ke positif atau negative dilihat dari hasil t-hitung dalam tabel. Hasil uji t akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t	Sig.
Ln_X1 PKB	6,390	0,000
Ln_X2 BBNKB	2,053	0,049
Ln_X3 Retribusi	1,602	0,112

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dengan sampel yang dapat digunakan yaitu 105 sampel dan tingkat signifikansi adalah 0,05, maka diperoleh t-tabel sebesar 1,983. Berdasarkan pada tabel 4.10, hasil dari pengujian parsial tiap variabel menunjukkan penjelasan sebagai berikut :

1. Variabel PKB menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $6,390 > 1,983$, hal ini menunjukkan bahwa variabel PKB secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD.
2. Variabel BBNKB menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,049 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,053 > 1,983$ hal ini menunjukkan bahwa variabel BBNKB secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PAD.
3. Variabel Retribusi Daerah menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,112 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,602 < 1,983$, hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel PAD.

4.2. Pembahasan

Dengan hasil yang telah diperoleh dari beberapa pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti akan menjelaskan lebih rinci dan membahas lebih detail mengenai hipotesis yang telah dihasilkan. Adapun pembahasan dari setiap hipotesis dijelaskan sebagai berikut :

a) Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kenaikan jumlah kendaraan yang berada pada suatu wilayah, dapat menunjang pertumbuhan pajak kendaraan bermotor (PKB). Dimana dimisalkan setiap keluarga yang terdiri dari 3 orang, setiap orangnya memiliki 1 motor pribadi, atau 1 orang memiliki 2 motor atau lebih. Maka pertumbuhan pajak kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah pun juga dapat berlipat ganda, sehingga dapat menunjang realisasi pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan *stewardship theory*, pemerintah daerah sebagai steward yang memiliki kewenangan untuk mengelola penerimaan keuangan daerah, yang dalam konteks pajak kendaraan bermotor dapat diketahui dari perencanaan pemerintah daerah dalam memungut pajak kendaraan bermotor seperti penerapan sistem pajak progresif pada PKB, peningkatan kualitas pelayanan dalam pemungutan PKB, dan pemberian denda terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran. Dengan melaksanakan perencanaan tersebut maka target dari pengumutan pajak kendaraan bermotor dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Periansya et al (2017) dan Aliah et al (2019) dimana menunjukkan hasil pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

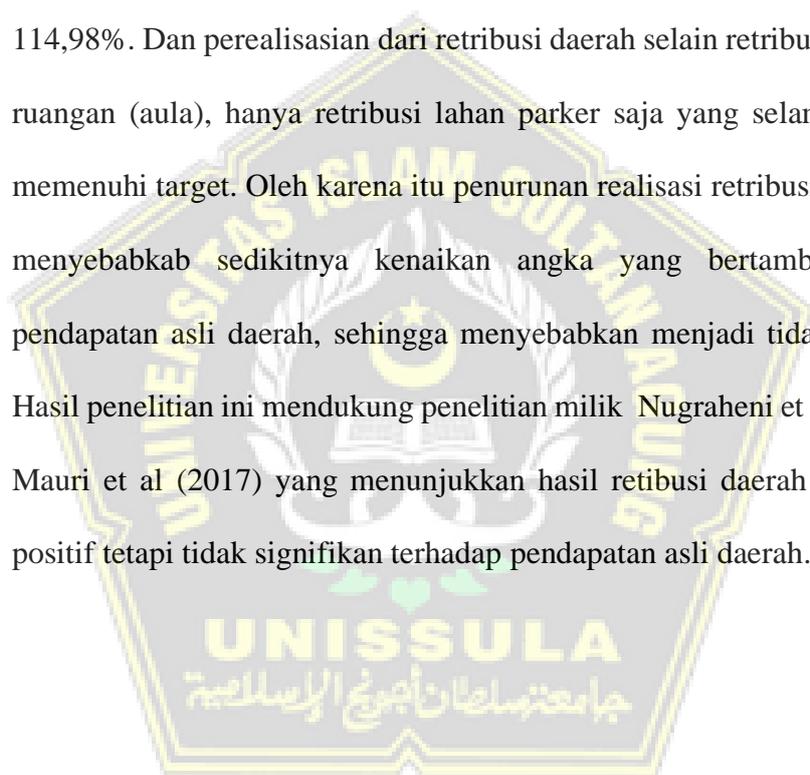
b) Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berkaitan dengan *stewardship theory*, nilai bea balik nama kendaraan bermotor yang semakin besar menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen yang telah dilakukan oleh *steward* (pemerintah daerah) dapat dikatakan baik sehingga bisa memenuhi ekspektasi dari *principal*. Peran dari pemerintah daerah (*steward*) dalam mengelola serta menciptakan situasi perekonomian yang stabil pada suatu daerah sangat dibutuhkan, hal ini guna menjaga keadaan jual dan beli agar tetap stabil, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat akan stabil juga. Dengan perekonomian yang stabil, maka kesuksesan akan dicapai oleh kedua pihak yaitu pemerintah daerah (*steward*) dan masyarakat (*principal*) dimana tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dapat naik sehingga bea balik nama kendaraan bermotor akan meningkat, dan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Saputra & Putri (2020) dan Nadya et al (2017) dimana menunjukkan hasil bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

c) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini retribusi daerah menunjukkan hasil tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan proses pemungutan jenis retribusi pada tiap daerah tidak terealisasi secara merata. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, masih terdapat beberapa daerah yang dalam

pelaksanaannya tidak memenuhi target dalam satu tahun pemungutan retribusi. Seperti halnya pada tahun 2021, tepatnya retribusi pemakaian ruangan (aula) terdapat 15 kabupaten dan kota yang tidak memenuhi target pemungutan retribusi. Penerimaan retribusi pemakaian ruangan (aula) hanya terealisasi sebesar 77,13%. Hasil tersebut menunjukkan penurunan drastis dari realisasi tahun 2020 sebesar 106,30% dan tahun 2019 sebesar 114,98%. Dan perealisasi dari retribusi daerah selain retribusi pemakaian ruangan (aula), hanya retribusi lahan parkir saja yang selama 3 periode memenuhi target. Oleh karena itu penurunan realisasi retribusi daerah akan menyebabkan sedikitnya kenaikan angka yang bertambah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga menyebabkan menjadi tidak signifikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian milik Nugraheni et al (2019) dan Mauri et al (2017) yang menunjukkan hasil retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan secara singkat mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya jika pajak kendaraan naik maka nilai dari pendapatan asli daerah juga naik. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat kenaikan pesat dalam kepemilikan kendaraan bermotor, yang mengakibatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi terorganisir, dan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan asli daerah.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat terjadi karena peran dari pemerintah daerah dalam menciptakan situasi perekonomian yang stabil, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Karena itu bea balik nama kendaraan akan dengan mudah bertumbuh, dan dapat mempengaruhi nilai pendapatan asli daerah.

3. Retribusi Daerah terbukti berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemaksimalan pemungutan retribusi dalam tiap daerah Provinsi Jawa Tengah. Dimana masih terdapat daerah yang tidak memenuhi target dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di wilayahnya masing-masing.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti bagi pihak lain, yaitu :

1. Bagi akademik, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau dasar untuk pengembangan penelitian tentang akuntansi sektor publik.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan perencanaan serta pengelolaan pendapatan keuangan daerah.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi tentang pendapatan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan eksistensi masyarakat terhadap pendapatan pemerintah daerah.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Populasi serta sampel yang dipakai pada penelitian ini masih terbatas, yaitu hanya menggunakan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2019-2021. Oleh karena itu masih belum menjelaskan mengenai PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah pada kabupaten dan kota di luar Provinsi Jawa Tengah dan periode yang digunakan tidak kurang dan tidak lebih dari 2019-2021.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas variabel PKB, BBNKB dan Retribusi Daerah. Sehingga penelitian ini dikhawatirkan belum mengkaji keseluruhan mengenai pendapatan asli daerah, dikarenakan masih terdapat banyak variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

5.4. Agenda Penelitian Mendatang

Dikarenakan terdapat keterbatasan dalam penelitian, maka agenda penelitian mendatang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel – variabel lain yang sekiranya mempengaruhi pendapatan asli daerah, seperti pdrb, jumlah penduduk, dana perimbangan, belanja modal, dan lain-lain.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi serta sampel yang lebih lengkap, lebih banyak, dan berbeda dalam penelitiannya .

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang berbeda sehingga dapat menjadi pembanding dalam penelitian yang serupa.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, B. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. ANDI.
- Aliah, N., Hamzah, A., & Nasir, M. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb) Terhadap Pad Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v6i1.14257>
- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Jurnal Profita*, 12(1), 50. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.004>
- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara*, 19(02), 97–107.
- Bernadin, D. E. Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Ekspansi*, 9(1), 19–35.
- BPS Jawa Tengah. (2021). *Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020*. BPS Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2226/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2020.html>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (5th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hahumury, M. A. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Merauke. *Musamus Journal of Economics Development*, 1(1), 27–43. <https://doi.org/10.35724/feb.v1i1.1228>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hermawan, A., Made, A., & Yogivaria, D. (2016). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA

MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(2), 1–11.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). ANDI.

Mashabi, S. (2021). *25 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri Sebut Banyak Daerah yang PAD Lebih Transfer Pusat*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/27/11502621/25-tahun-otonomi-daerah-mendagri-sebut-banyak-daerah-yang-pad-lebih>

Mauri, A. P., Mattalatta, & Hasmin. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. *Mirai Management, STIE Amkop Makassar*, 2, No. 1, 175–193.

Nadya, P., Rakatitha, K., Nadya, P., & Rakatitha, K. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1575–1600.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p26>

Ningsih, S. W., & Rahmayati, A. (2018). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper*.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10410/5.SEPTIANA%2C%20DKK.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Nugraheni, I. P., Rusmijati, & Indrawati, L. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2018. *Directory Journal of Economic*, 1(3), 338–347.

Nugrahwati, R. E., Marwoto, P. B., & Mulyani, H. T. S. (2019). ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis STIE-IBEK*, 7(November), 41–50.

Pemerintah Daerah Jawa Tengah. (2011a). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah*.

Pemerintah Daerah Jawa Tengah. (2011b). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*.

Pemerintah Daerah Jawa Tengah. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah*.

- Pemerintah Daerah Jawa Tengah. (2020). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2020 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2020.*
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- Periansya, Elvina, D., & Indriasari, D. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.*
- Pramartha, A., & Aswitari, L. P. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah , Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi UNUD*, 7(8), 1767–1795.
- Putra, D. A. (2020). *Pendapatan Asli Daerah Diprediksi Turun 40 Persen Gara-Gara Corona.* <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4227402/pendapatan-asli-daerah-diprediksi-turun-40-persen-gara-gara-corona>
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). *THE EFFECTS OF LOCAL TAX AND LOCAL RETRIBUTION ON LOCAL REVENUE (Case Study in Local Government of the Cirebon District for Year 2010-2014).* 281–288. <https://core.ac.uk/download/pdf/299899996.pdf>
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Saputra, E., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh PKB, BBNKB, Dan PBBKB Terhadap PAD (Studi pada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 – 2019). *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 3(3), 134–144.
- Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi*

Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 5(1), 1–13.
<https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>

Subagyo, Putri, V. W., & Andoko, W. (2018). Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Kediri terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. *Cahaya Aktifa*, 8(2), 34–45.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. ALFABETA.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). ALFABETA.

Syahrums, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (R. Ananda (ed.)). Citapustaka Media.

Tengah, B. J. (n.d.). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Unit), 2018-2020*.
<https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html>

Tresnawati, R., & Putri, E. A. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(2), 73. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9228>

Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Syechalad, M. N. (2014). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(1), 70–79.

Yoni, R. (2020). *GEGARA COVID 19, PAD JATENG TURUN Rp.1,9 TRILYUN*.
<https://bappeda.jatengprov.go.id/gegara-covid-19-pad-jateng-turun-rp-19-trilyun/>

Yusuf. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104.